

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Pertumbuhan ekonomi pada umumnya merupakan usaha yang dapat ditempuh untuk meningkatkan pendapatan masyarakatnya. Kenyataannya, pertumbuhan ekonomi yang cepat akan menimbulkan tingkat ketimpangan pendapatan, jika tidak memperhatikan pertumbuhan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Ketimpangan pendapatan merupakan inti permasalahan dalam pelaksanaan pertumbuhan ekonomi yang dilaksanakan oleh sejumlah negara miskin dan negara berkembang (Sukirno, 2016).

Permasalahan ketimpangan pendapatan tidak dapat dipisahkan dari permasalahan kemiskinan, biasanya terjadi pada negara miskin dan negara berkembang. Menurut Lincoln Arsyad, banyak negara sedang berkembang yang mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi pada tahun 1960-an mulai menyadari bahwa pertumbuhan yang semacam itu hanya sedikit manfaatnya dalam memecahkan masalah kemiskinan (Kuncoro M. , 2018)

Sebagai suatu negara yang terdiri dari ribuan pulau, perbedaan karakteristik wilayah adalah konsekuensi yang tidak dapat dihindari oleh Indonesia. Karena karakteristik wilayah mempunyai pengaruh kuat pada terciptanya pola pembangunan ekonomi, sehingga suatu kewajaran bila pola pembangunan ekonomi di Indonesia tidak seragam. Ketidakseragaman ini berpengaruh pada kemampuan untuk tumbuh yang pada gilirannya mengakibatkan beberapa wilayah mampu tumbuh dengan cepat sementara wilayah lainnya tumbuh lambat. Kemampuan tumbuh ini kemudian menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan antar daerah (Saraswati, 2020)

Perhitungan ketimpangan pendapatan yang sangat populer digunakan oleh para ekonom adalah Indeks Rasio Gini, karena perhitungan ini cukup untuk menjelaskan hubungan antara kelompok penduduk yang berpendapatan tinggi dengan kelompok penduduk lainnya (Syamudin, 2011). Kriteria ketimpangan

**Muhammad Farhan, 2021**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIMPANGAN PENDAPATAN DI PULAU JAWA**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.ac.id](http://www.library.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

pendapatan berdasarkan Indeks Rasio Gini menurut (Todaro, 2011) adalah lebih dari 0,5 merupakan tingkat ketimpangan tinggi; antara 0,35 - 0,5 merupakan tingkat ketimpangan sedang, dan kurang dari 0,35 merupakan tingkat ketimpangan rendah. Berikut ini adalah tabel 1 yang memperlihatkan pembentuk Rasio Gini Nasional tahun 2014 hingga 2020 sebagai berikut:

**Tabel 1. Peranan Pulau dalam Pembentukan Rasio Gini Tahun 2014-2020**

Wilayah	Rasio Gini						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sumatera	0,349	0,336	0,337	0,331	0,325	0,321	0,319
Jawa	0,414	0,406	0,395	0,401	0,385	0,385	0,387
Bali dan Nusa Tenggara	0,383	0,369	0,367	0,372	0,371	0,37	0,366
Kalimantan	0,363	0,318	0,332	0,329	0,331	0,326	0,319
Sulawesi	0,411	0,380	0,382	0,386	0,375	0,378	0,374
Maluku dan Papua	0,379	0,361	0,363	0,359	0,362	0,352	0,35
Indonesia	0,412	0,402	0,390	0,391	0,384	0,38	0,381

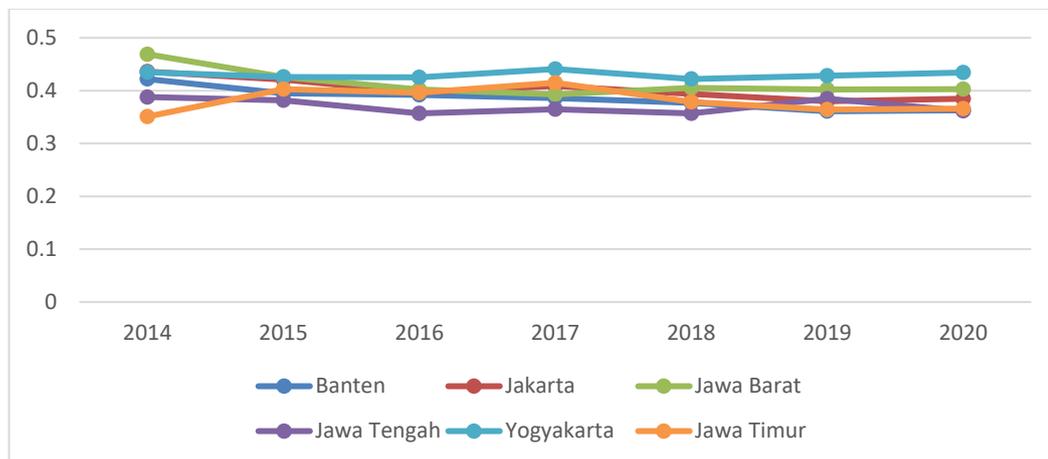
*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020*

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan antar pulau di Indonesia rata-rata masuk dalam kategori jenis ketimpangan sedang yang diukur dari Rasio Gini. Dapat dilihat bahwa Pulau Jawa memiliki nilai rasio gini lebih tinggi dan berada di atas angka ketimpangan nasional jika dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya di Indonesia, padahal perekonomian secara umumnya masih berpusat di Pulau Jawa. Dari pencapaian pertumbuhan ekonomi sampai saat ini, Pulau Jawa memberikan kontribusi paling besar di antara pulau lainnya yakni mencapai 58,75 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang terpusat di Pulau Jawa ini justru malah menjadi penyebab tingginya ketimpangan yang terjadi, yang berarti menandakan masih adanya kesenjangan antara percepatan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan hasil pembangunan antar daerah. Hal ini disebabkan karena semakin tingginya tingkat urbanisasi perpindahan penduduk ke kota besar akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan di pedesaan, namun perpindahan penduduk tersebut tidak diimbangi dengan keahlian atau kemampuan yang memadai sehingga menjadikan sumber daya manusia yang dimiliki pun rendah, oleh sebab itu akan berdampak pada tingkat pengangguran yang tinggi dan berakibat pada kemiskinan (Santoso, 2021).

Ekonomi daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi rendah akan cenderung mempunyai tindakan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah serta kurang lancarnya mobilitas faktor produksi, seperti tenaga kerja dan modal antar wilayah juga merupakan terjadinya ketimpangan pendapatan (Sjafrizal, 2017).

Adanya ketimpangan pendapatan ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapatan antara individu yang satu dengan individu yang lain atau kelompok yang satu dengan kelompok yang lain yang dapat diukur menggunakan indeks rasio gini (Badriah, 2019). Berikut adalah grafik yang menunjukkan Indeks Rasio Gini di Pulau Jawa tahun 2014-2020:

**Grafik 1. Rasio Gini Pulau Jawa tahun 2014-2020 (Persen)**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa ketimpangan antar provinsi di Pulau Jawa cukup berfluktuatif setiap tahunnya. Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2014-2016 mengalami penurunan ketimpangan dari 0,436 persen tahun 2014 menjadi 0,421 persen tahun 2015 lalu turun lagi sebesar 0,397 persen. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta selalu tumbuh di atas perekonomian nasional yang tercatat dalam BPS sebesar 5,86 persen sementara ekonomi Indonesia tumbuh 5,02 persen, namun capaian tersebut mengalami tren perlambatan seiring lesunya ekonomi domestik. Pada tahun 2017 ketimpangan DKI Jakarta mengalami kenaikan sebesar 0,409 persen disebabkan oleh kesenjangan antara orang kaya dengan orang miskin di DKI Jakarta semakin melebar karena kenaikan pendapatan orang kaya yang terlalu cepat, namun pendapatan masyarakat

menengah dan bawah justru mengalami perlambatan (Databoks, 2017).

Sama halnya dengan Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat juga mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2014-2017 indeks rasio gini menurun disebabkan sumber daya manusia di Jawa Barat terkonsentrasi pada usaha pariwisata dengan jumlah penyerapan tenaga kerja terbanyak, namun pada tahun 2018 indeks rasio gini meningkat sebesar 0,405 persen diakibatkan adanya kesenjangan antara Kompetensi Kerja Standar (KKS) dengan Kompetensi Kerja Nyata (KKN) (Reyaan, 2017).

Provinsi Jawa Tengah juga mengalami fluktuasi indeks rasio gini dimana pada tahun 2014-2016 mengalami penurunan namun pada tahun 2017 meningkat sebesar 0,365 persen disebabkan oleh tingginya ketergantungan pada industri pengolahan, kurangnya sumber pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya mobilitas tabungan masyarakat. Pada tahun 2018 ketimpangan dapat diatasi, namun di tahun 2019 kembali lagi meningkat sebesar 0,385 persen dikarenakan migrasi penduduk produktif yang memiliki keahlian ke daerah-daerah yang telah berkembang terutama Kota Semarang, dan kebijakan pemerintah yang berbeda-beda (Fahrizal, 2019).

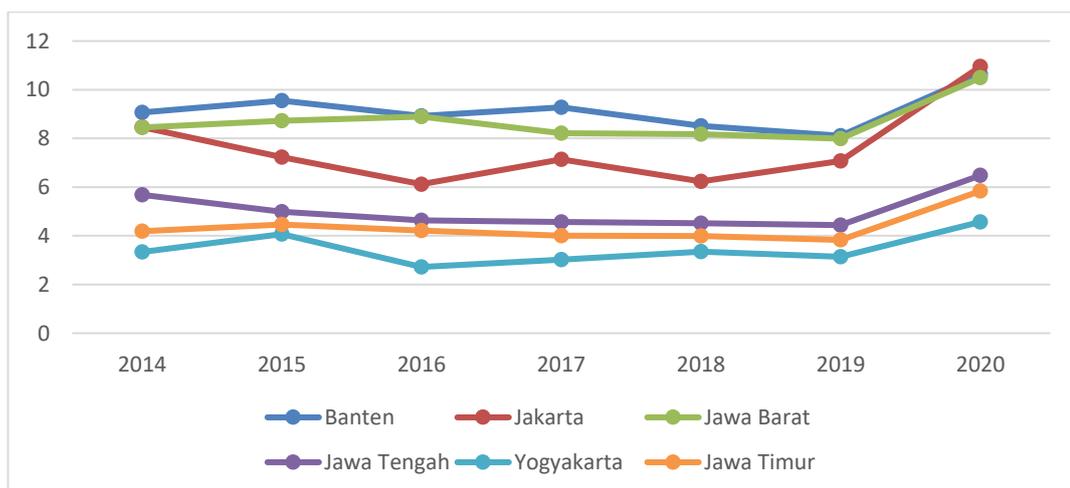
Begitu juga dengan Provinsi D.I Yogyakarta dimana indeks rasio gini pada tahun 2014-2016 menurun namun di tahun 2017 meningkat sebesar 0,441 persen lantaran banyaknya spekulasi tanah, pembangunan mal dan hotel di D.I Yogyakarta. Pada tahun 2018 ketimpangan pendapatan menurun tetapi meningkat kembali di tahun 2019 sebesar 0,428 persen disebabkan banyak masyarakat miskin yang tidak mampu memiliki akses terhadap sumber-sumber pendapatan, terlebih lagi ditambah dengan situasi perekonomian terpuruk akibat pandemi *Covid-19* (Zuhriyah, 2019).

Berfluktuasinya indeks rasio gini juga terjadi di Provinsi Jawa Timur dimana tahun 2015 ketimpangan pendapatan disana meningkat sebesar 0,403 persen dikarenakan meningkatnya angka pengangguran di tahun yang sama sebesar 4,47 persen sehingga mengakibatkan kemiskinan di Jawa Timur ikut meningkat sebesar 12,34 persen. Tahun 2016 ketimpangan dapat diturunkan namun kembali lagi meningkat sebesar 0,415 di tahun 2017 disebabkan meningkatnya jumlah penduduk di Jawa Timur dan terjadinya inflasi di tahun tersebut (Arzaqi & Astuti, 2018).

Secara keseluruhan tingkat ketimpangan pendapatan tertinggi ada di provinsi Jawa Barat pada 2014 yaitu sebesar 0,469 persen. Sementara Jawa Timur menjadi provinsi yang memiliki tingkat ketimpangan pendapatan terendah di tahun yang sama, yaitu sebesar 0,351 persen. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor antara lain, pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan menurunnya pendapatan perkapita, ketidakmerataan pembangunan daerah, dan rendahnya mobilitas sosial. Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini yaitu angka ketimpangan pendapatan yang lebih tinggi dari ketimpangan pendapatan nasional (Matondang, 2018).

Ketimpangan pendapatan setidaknya didorong oleh beberapa faktor diantaranya yaitu inflasi, pengangguran, kemiskinan, kebijakan fiskal, dan lain-lain. (Ibnurrasyad, 2014). Tingkat pengangguran yang ada pada suatu wilayah dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Semakin besar tingkat pengangguran di suatu daerah berarti menurunkan tingkat produktivitas dan akan memicu menurunnya pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut, sementara wilayah lain terjadi peningkatan tingkat kesejahteraan (Yusica, 2018). Berikut adalah grafik yang menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Jawa pada tahun 2014 sampai tahun 2020:

**Grafik 2. Tingkat Pengangguran Pulau Jawa tahun 2014-2020 (Persen)**



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Berdasarkan grafik di atas, Provinsi Banten memiliki angka pengangguran yang berfluktuasi, terlihat pada tahun 2015 tingkat pengangguran Provinsi Banten

meningkat sebesar 9,55 persen karena tenaga kerja di sektor pertanian banyak yang menganggur sebab belum masa panen. Tahun 2016 pengangguran dapat diturunkan, namun kembali meningkat lagi tahun 2017 sebesar 9,28 persen karena adanya kenaikan upah buruh sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja di sektor industri (Amna, 2017).

Provinsi DKI Jakarta juga mengalami fluktuasi tingkat pengangguran, dimana pada tahun 2014-2016 menurun tetapi tahun 2017 meningkat sebesar 7,14 persen karena adanya peningkatan jumlah angkatan kerja di Indonesia, namun tahun 2018 menurun sebesar 6,24 persen kemudian meningkat kembali tahun 2019 sebesar 7,07 persen karena krisis kesehatan yang belum dapat dikendalikan (Wiryono & Maullana, 2020).

Hal yang sama juga terjadi di Provinsi Jawa Barat dimana terjadi peningkatan di tahun 2015 sebesar 8,72 persen menjadi 8,89 persen tahun 2016 karena sebagian besar angkatan kerja di Jawa Barat berpendidikan SD ke bawah sedangkan yang tamat perguruan tinggi hanya 7,7 persen. Tahun 2017-2019 tingkat pengangguran sudah menurun dan kembali lagi naik tahun 2020 sebesar 10,49 persen karena adanya pandemi *Covid-19* yang menghambat perekonomian (Jo, Jabarprov.go.id, 2017).

Provinsi D.I Yogyakarta (DIY) juga mengalami peningkatan tingkat pengangguran di tahun 2015 sebesar 4,07 persen dikarenakan laju perekonomian DIY saat itu melambat, selain itu jumlah lulusan sekolah terus bertambah namun lapangan pekerjaan tetap sebab kemampuan perusahaan di DIY dalam menyerap tenaga kerja tidak terlalu tinggi, namun ditahun selanjutnya tingkat pengangguran sudah dapat dikendalikan (Tempo, Bisnis.tempo.co, 2016).

Begitu juga dengan Provinsi Jawa Timur yang tingkat penganggurannya juga meningkat sebesar 4,47 persen di tahun 2015 dikarenakan banyaknya jumlah pekerja yang tidak memenuhi kualifikasi perusahaan, selain itu pekerja di Jawa Timur masih didominasi oleh para pekerja di sektor-sektor informal. Terlebih lagi struktur lapangan pekerjaan yang dominan masih tidak berubah (Pradipta, 2016).

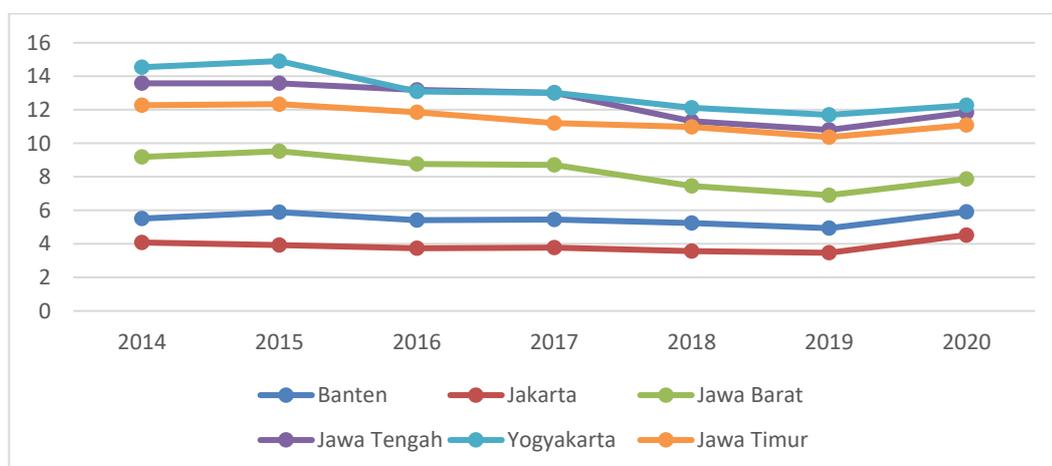
Secara keseluruhan, Provinsi Banten merupakan provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi dari tahun 2014-2020 di Pulau Jawa. Hal ini disebabkan oleh kurangnya lapangan pekerjaan dibandingkan dengan jumlah pencari kerja di

Provinsi Banten, dan tingkat pengangguran terendah ada di provinsi Yogyakarta pada tahun 2016 yaitu sebesar 2,72 persen (Adriyanto, 2020).

Upaya menurunkan tingkat pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan adalah sama pentingnya. Secara teori jika masyarakat tidak menganggur berarti mempunyai pekerjaan dan penghasilan, dengan penghasilan yang dimiliki dari bekerja diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup, sehingga dikatakan dengan tingkat pengangguran rendah maka tingkat kemiskinan juga rendah (Yacoub, 2012).

Naik atau turunnya Indeks Rasio Gini mempunyai hubungan yang erat dengan kemiskinan. Kemiskinan berfungsi sebagai proksi antara kelas tinggi dan rendah. Semakin banyak masyarakat miskin maka distribusi pendapatan tentu akan semakin lebar. Begitu pula sebaliknya, semakin sedikit masyarakat miskin maka distribusi akan merata (Zulkifli, 2016). Berikut ini adalah grafik yang menunjukkan Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2014 sampai tahun 2020:

**Grafik 3. Tingkat Kemiskinan Pulau Jawa tahun 2014-2020 (Persen)**



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Berdasarkan grafik di atas, tingkat kemiskinan di Provinsi Banten mengalami kenaikan pada tahun 2015 sebesar 5,90 persen dikarenakan terjadinya inflasi umum pada September 2016-Maret 2017 sebesar 2,52 persen lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi umum Maret-September 2016 sebesar 0,92 persen, tetapi tingkat kemiskinan ini dapat diatasi sehingga tahun pada tahun 2016 turun sebesar 5,42 persen namun di tahun 2017 kembali meningkat walaupun tidak signifikan yaitu sebesar 5,45 persen (Hidayat, et al., 2018).

Muhammad Farhan, 2021

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIMPANGAN PENDAPATAN DI PULAU JAWA**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.ac.id](http://www.library.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

Sama halnya dengan Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta juga mengalami kenaikan tingkat kemiskinan di tahun 2017 sebesar 3,77 persen karena bertambahnya jumlah penduduk dan juga meningkatnya indeks keparahan kemiskinan di DKI Jakarta sebab pilihan strategi dan pelaksanaan program pengentasan masyarakat dari kemiskinan belum berjalan optimal, tetapi di tahun selanjutnya yaitu tahun 2018-2019 mengalami penurunan (Suyanto, 2018).

Begitu juga dengan Provinsi D.I Yogyakarta yang mengalami peningkatan pada tahun 2015 sebesar 14,91 persen lalu pada tahun 2016-2019 kembali menurun. Faktor penyebab peningkatan kemiskinan ini adalah adanya inflasi yang tidak stabil pada Maret 2015-Maret 2016 sebesar 3,69 persen dan inflasi pada September 2015 ke Maret 2016 sebesar 1,56 persen sehingga daya beli masyarakat menjadi menurun (Tempo, 2016).

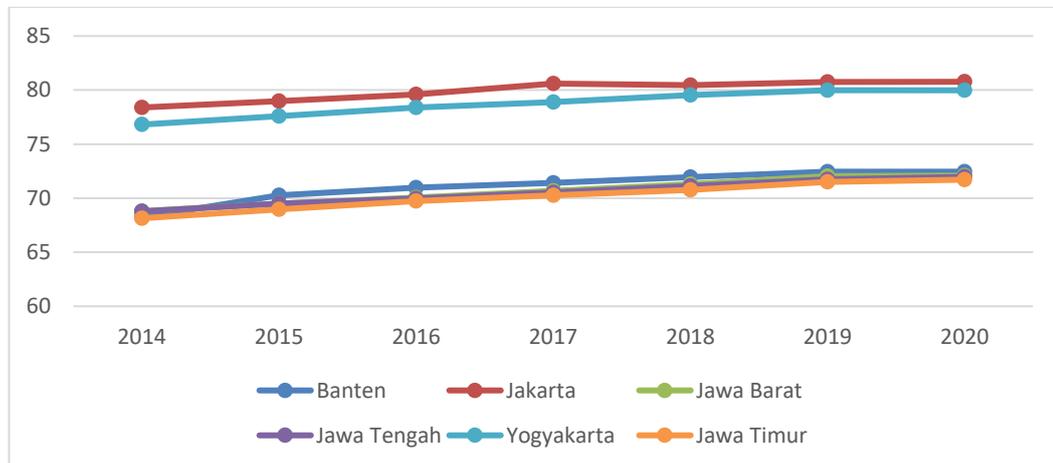
Provinsi Jawa Timur juga memiliki persentase tingkat kemiskinan meningkat di tahun 2015 sebesar 12,34 persen dari 12,28 persen di tahun 2014. Hal ini disebabkan adanya perlambatan laju pertumbuhan ekonomi dibanding tahun sebelumnya yaitu tumbuh sebesar 5,44 persen yang dipengaruhi adanya efek musiman beberapa komoditi pertanian, kehutanan, dan perikanan (Badan Pusat Statistik, 2016).

Pendapatan merupakan penentu utama dan hasil dari pembangunan manusia. Orang miskin menggunakan tenaga mereka untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi, tetapi kemiskinan akibat kurangnya pendidikan, serta gizi dan kesehatan yang buruk mengurangi kapasitas mereka untuk bekerja. Dengan demikian akibat rendahnya Indeks Pembangunan Manusia orang miskin tidak dapat mengambil keuntungan oportunitas pendapatan produktif karena terjadinya pertumbuhan ekonomi, oleh karena itu penyediaan pelayanan sosial dasar merupakan unsur penting dalam kemiskinan (Dewi, 2017).

Kenaikan pendapatan yang besar dapat berperan relatif lebih kecil dalam pembangunan manusia. Ketimpangan yang terjadi pada suatu wilayah akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah itu sendiri. Tidak meratanya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diberbagai daerah menyebabkan terdapat daerah yang lebih maju karena kualitas manusianya lebih baik dan ada daerah yang tidak maju karena kualitas manusianya rendah (Todaro, 2011).

Berikut ini adalah grafik yang menunjukkan data Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Jawa tahun 2014 sampai dengan tahun 2020:

**Grafik 4. IPM di Pulau Jawa Tahun 2014-2020 (Persen)**



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Berdasarkan data pada grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tiap provinsi pada Pulau Jawa tahun 2014-2020 secara konsisten terus mengalami kemajuan setiap tahunnya, yang mengartikan bahwa status atau level pembangunan manusia di Provinsi Banten masih tertahan pada kategori tinggi. Hal ini dikarenakan Pulau Jawa hampir semuanya rata-rata sudah melek huruf dan mendapat pendidikan yang cukup. Adanya peningkatan kualitas Indeks Pembangunan Manusia disebabkan berkembang pesat pada daerah untuk memperoleh fasilitas seperti kesehatan dan pendidikan yang layak. Tentunya hal ini mempengaruhi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik sehingga layak mendapatkan pekerjaan yang lebih tinggi dengan upah yang tinggi. Semakin tinggi rata-rata pendapatan yang diterima, maka tingkat ketimpangan juga menurun (Pratowo, 2012).

Adanya perbedaan tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan dan indeks pembangunan manusia (IPM) akan menimbulkan permasalahan ketimpangan pendapatan (Ermatry, 2019). Hal ini didukung dengan adanya penelitian yang dilakukan penelitian oleh Verry Noval Ariadi (2020) yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan Terhadap

Ketimpangan Pendapatan di Kalimantan Selatan, dengan hasil penelitian pengangguran dan kemiskinan berpengaruh signifikan. Penelitian lainnya yang dilakukan Hariani 2019 yang berjudul Analisis faktor faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Jawa Timur, dengan hasil penelitian Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan positif sedangkan Pengangguran tidak signifikan. Penelitian Reza (2018) yang berjudul analisis faktor-faktor mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Indonesia memiliki hasil signifikan negatif pada variabel Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah variabel independen (X) yang digunakan yaitu Pengangguran, Kemiskinan dan IPM serta lokasi penelitian yang berbeda yaitu di Pulau Jawa. Keterkaitan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terdapat variabel bebas dan variabel terikat yang sama sehingga dapat dijadikan referensi bagi peneliti untuk membandingkan hasil penelitian, kemudian diharapkan dengan adanya kesamaan variabel dapat membantu mendukung hasil dari penelitian.

Berdasarkan data dan penelitian diatas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan hasil penelitian dari jurnal referensi, yaitu ada yang hasilnya berpengaruh dan ada yang hasilnya tidak berpengaruh, serta karena masih terbatasnya riset yang menggunakan Pengangguran, Kemiskinan dan IPM terhadap ketimpangan pendapatan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa.

## **I.2 Perumusan Masalah**

Ketimpangan pendapatan menjadi isu penting bagi pembangunan setiap negara. Ketimpangan pendapatan merupakan tolak ukur dari distribusi pendapatan masyarakat dalam suatu daerah atau wilayah pada periode tertentu. Semakin tinggi ketimpangan pendapatan berarti distribusi pendapatan di masyarakat semakin tidak merata. Pulau Jawa menduduki posisi pertama dengan tingkat ketimpangan pendapatan tertinggi di Indonesia disaat kondisi pengangguran dan kemiskinan mengalami penurunan tiap tahunnya yang sudah cukup baik, walaupun pada wilayah dan tahun tertentu mengalami peningkatan. Data indeks pembangunan manusia menunjukkan angka yang baik setiap tahunnya yang seharusnya dapat

memberikan dampak positif dalam mengurangi ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa.

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Ketimpangan Pendapatan Pulau Jawa tahun 2014-2020?
- b. Bagaimana pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan Pulau Jawa tahun 2014-2020?
- c. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Pendapatan Pulau Jawa tahun 2014-2020?

### **I.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Ketimpangan Pendapatan Pulau Jawa tahun 2014-2020
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan Pulau Jawa tahun 2014-2020
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Pendapatan Pulau Jawa tahun 2014-2020

### **I.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis  
Menambah pengetahuan secara mendalam bagi setiap individu mengenai pengaruh Pengangguran, Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa tahun 2014-2020 dan sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya.
- b. Manfaat Praktis
  - 1) Pemerintah  
Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam memperhatikan Tingkat Pengangguran, Tingkat Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Pendapatan.

2) Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam memantau dan mengontrol Ketimpangan Pendapatan.

3) Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan untuk mengetahui tentang Ketimpangan Pendapatan.